# ANALISIS

# Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palangka Raya

## Tahun 2013-2017

ANALISIS

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
# KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2013-2017

Ukuran Buku : 21 X 29,7 CM
Jumlah Halaman: xi+47

## KATA PENGANTAR

Dalam kesempatan ini, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya lah kami dapat menyusun dan menerbitkan publikasi "Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017".

Dengan kehadiran laporan ini diharapkan mampu untuk memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh Kota Palangka Raya dalam bidang pembangunan manusia, dan juga semoga kehadiran buku publikasi ini dapat menjawab kebutuhan dari konsumen data baik dari pemerintah maupun dari swasta, terutama data/informasi dalam aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan konteks pembangunan manusia di Kota Palangka Raya.

Dalam penyusunan laporan ini, walaupun telah dilakukan usaha semaksimal mungkin, namun masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang ada. Sehingga saran dan kritik yang membangun, sangatlah kami perlukan untuk keperluan perbaikan di masa yang akan datang.

Tidak lupa pula kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penyusunan dan penerbitan buku publikasi ini.

Palangka Raya, Desember 2018

| | |
|---|---|
| Kepala Bappeda<br>Kota Palangka Raya, | Kepala Badan Pusat Statistik<br>Kota Palangka Raya, |
| H. Akhmad Fordiansyah, S.H, M.A.P | Agie, SH, M.Hum. |
| NIP. 19641121 198503 1 008 | NIP. 19631011 198403 1 002 |

**DAFTAR ISI**

Halaman

KATA PENGANTAR..... iii
DAFTAR ISI..... v
DAFTAR GAMBAR..... vii
DAFTAR TABEL..... ix
DAFTAR LAMPIRAN..... xi
I. PENJELASAN UMUM 1
1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia..... 3
1.2 Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia..... 5
1.3 Perubahan Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia..... 6
II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN..... 11
2.1 Pencapaian Pembangunan Manusia..... 13
2.2 Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia..... 13
III. ANALISIS IPM KOTA PALANGKA RAYA..... 19
3.1 Struktur Ekonomi..... 21
3.2 Status Pembangunan Manusia Palangka Raya..... 22
3.3 Perkembangan Dimensi IPM Kota Palangka Raya Tahun 2010-2014..... 23
IV. KESIMPULAN..... 35
LAMPIRAN..... 37

## DAFTAR GAMBAR


Halaman

1.1 Tahapan Perubahan Metodologi Penghitungan IPM..... 7

1.2 Perbandingan Metode Lama dan Metode Penghitungan IPM Antara BPS dan UNDP Menurut Dimensi IPM..... 9

3.1 Perkembangan IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017..... 23

3.2 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017..... 24

3.3 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya, Tahun 2013 – 2017(Tahun)..... 25

3.4 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2017 (Tahun)..... 26

3.5 Pertumbuhan Rata-rata lama sekolah di Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017 (Persen)..... 27

3.6 RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah,Tahun 2017 (Tahun)..... 28

3.7 HLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Tahun)..... 29

3.8 Pertumbuhan Angka HLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Persen)..... 29

3.9 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 (Persen)..... 31

3.10 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Ribu Rp) ..... 32

3.11 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten /Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Persen)..... 33

3.12 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Persen) ..... 34

## DAFTAR TABEL


| | | Halaman |
|---|---|---|
| 1.1 | Indikator Minimum dan Maksimum Komponen IPM..... | 6 |
| 1.2 | Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru Dimensi IPM Antara BPS dan UNDP..... | 8 |
| 2.1 | Daftar Paket Komoditi yang Digunakan Dalam Penghitungan PPP..... | 16 |
| 3.1 | Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017..... | 24 |

## DAFTAR LAMPIRAN


Halaman

Lampiran 1. Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)..... 41

Lampiran 2. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)..... 42

Lampiran 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)..... 43

Lampiran 4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (ribu Rupiah)..... 44

Lampiran 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)..... 45

Lampiran 6. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Miliar Rp)..... 46

Lampiran 7. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Persen)..... 47

# BAB I

# PENJELASAN UMUM

# I. PENJELASAN UMUM

## 1.1 Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Strategi pembangunan selama ini lebih menekankan pada bagaimana meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Metode ini di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak mampu menekan angka pengangguran serta mengatasi kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa sukses dan tidaknya pembangunan di suatu daerah tidak hanya cukup diukur dengan pertumbuhan ekonomi saja, melainkan perubahan positif dalam bidang sosial, politik, budaya dan lingkungan serta fokus pada manusia dan kesejahteraannya. *United Nations Development Programme* (UNDP) menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang (*Human Development Report* 1990).

Pertanyaan yang sering muncul dari para pengambil kebijakan baik di daerah maupun di pusat adalah, Mengapa pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi angka kemiskinan dan pengangguran juga tinggi? Jawabannya adalah, pertumbuhan ekonomi sering tidak diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan yang sesuai (*Growth without employment*). Jika kita perhatikan lebih lanjut, kategori apa saja yang memicu pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Kita akan mendapatkan, bahwa sektor yang berkembang di Indonesia adalah sektor-sektor yang modern seperti perbankan, sektor finansial, teknologi informasi, telekomunikasi, dan lain-lain. Sektor ini membutuhkan SDM yang berkualitas dan mempunyai pendidikan serta keterampilan yang tinggi. Jika dilihat lebih dalam lagi, SDM yang tersedia di Indonesia adalah SDM dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak punya keterampilan, serta sedikit yang mampu menguasai bahasa asing. Itulah penyebabnya mengapa angka pengangguran masih cukup tinggi di Indonesia.

Manusia merupakan sumber daya sesungguhnya yang akan melakukan pembangunan dan juga sebagai tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Meskipun pembangunan ekonomi dipandang lebih utama daripada pembangunan manusia, namun pembangunan manusia tidak dapat diabaikan.

Konsep pembangunan manusia yang didefinisikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Berdasarkan konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, dan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembagunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui umur harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi.

Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas, terutama apabila disajikan tersendiri, yang hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu daerah. Namun demikian, manfaat yang terbatas tersebut dapat diperluas apabila dilakukan perbandingan antar waktu dan antar daerah, sehingga posisi relatif suatu daerah terhadap daerah yang lain dapat diketahui serta kemajuan/pencapaian antar waktu di suatu daerah dan perbandingannya dengan pencapaian daerah lain dapat dibahas.

IPM bernilai 0-100 yang semakin tinggi menyatakan status pencapaian yang lebih tinggi. UNDP membagi nilai IPM menjadi tiga kriteria, yaitu:

1. Rendah : IPM kurang dari 60,
2. Sedang : IPM antara 60-69,
3. Tinggi : IPM antara 70-79,
4. Sangat Tinggi : IPM bernilai 80 atau lebih.

**1.2 Kegunaan Indeks Pembangunan Manusia**

Tujuan utama dari IPM pada dasarnya adalah untuk memperlihatkan apakah pembangunan di suatu daerah sudah mengakomodasikan partisipasi seluruh penduduk dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam pengertian ini, penduduk tidak lagi dipandang sebagai objek atau sasaran pembangunan saja, tetapi dilibatkan dalam proses pembangunan sebagai subjek yang ikut mengambil keputusan. Dalam terminologi pembangunan, hal itu dikenal sebagai *people centered development*.

Paradigma pembangunan manusia memandang pembangunan bukan tujuan, melainkan sebagai sarana (*means*) memperluas peluang melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli penduduk. IPM sebagai alat ukur, dengan demikian dapat digunakan untuk melihat kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, yang dalam bahasa pemerintahan berarti menilai kinerja dan peranan birokrasi dalam pencapaian menuju hidup layak.

Penghitungan IPM pertama kali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1990 untuk level provinsi dan tahun 1996 pada level kabupaten, yang dilakukan setiap tiga tahun sekali. Sejak tahun 2004 penghitungan IPM dilakukan rutin setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk berbagai kepentingan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. Dapat menentukan peringkat atau level pembangunan antar wilayah/negara.
3. Sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. Salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI.

Untuk keperluan membandingkan antar Kabupaten/Kota yang lain, tingkatan status IPM adalah indikator dampak sehingga memberikan gambaran tentang dampak pembangunan. Indikator yang digunakan untuk kondisi terburuk dan kondisi terbaik dari setiap faktor adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Indikator Minimum dan Maksimum Komponen IPM**

| Komponen | Satuan | Minimum | | Maksimum | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | UNDP | BPS | UNDP | BPS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) | Tahun | 20 | 20 | 85 | 85 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita | | 100 (PPP U$) | 26 572 352 (Rp) | 100. 721 (PPP U$) | 26 572 352 (Rp) |

Sumber : BPS

### 1.3 Perubahan Metode Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

Selama dua puluh lima tahun terakhir sejak tahun 1990 dimana IPM pertama kali *launching*, telah dilakukan beberapa kali perubahan baik indikator maupun metode penghitungan bahkan penyempurnaan itu dimulai mulai tahun 1991 dilanjutkan tahun 1995 , tahun 2010 , tahun 2011 dan terakhir tahun 2014. Perubahan tersebut terus

dilakukan dalam upaya agar menghasilkan indeks yang representatif sesuai dengan kondisi zaman dan perekonomian terkini.

**Gambar 1.1 Tahapan Perubahan Metodologi Penghitungan IPM**

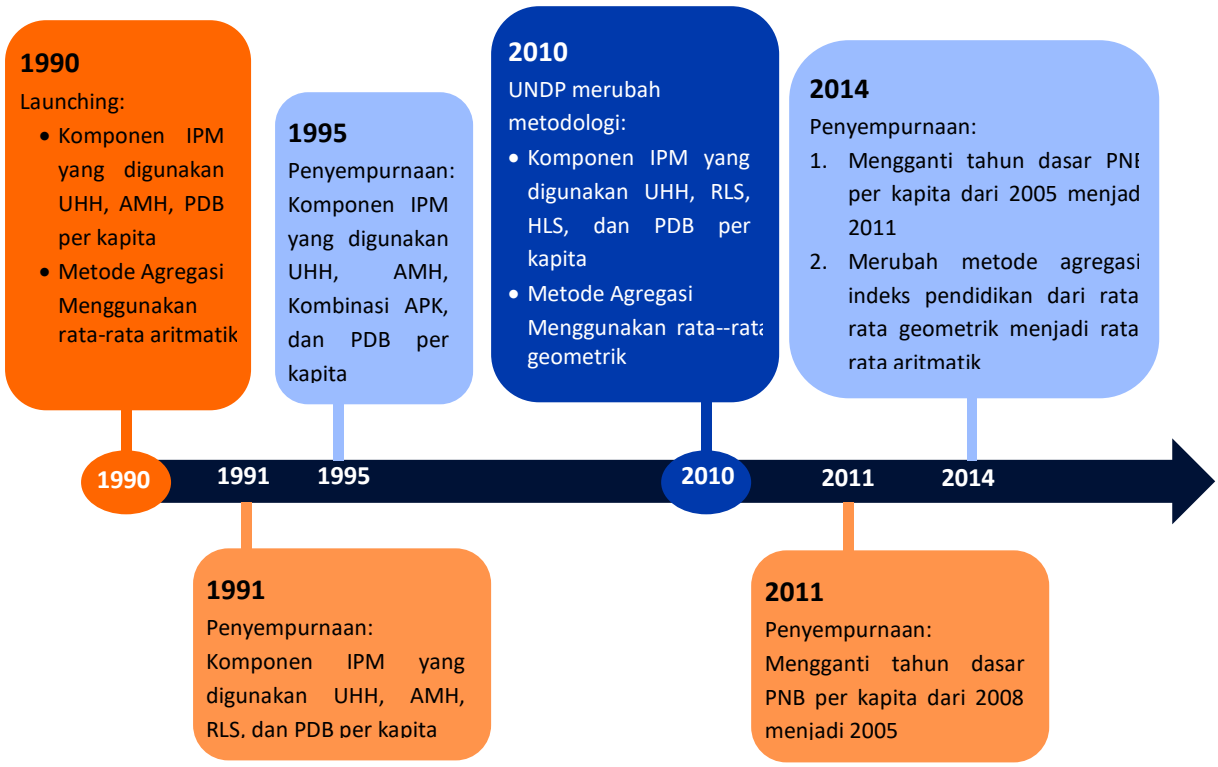


Catatan:

| | | | |
|---|---|---|---|
| UHH | : Umur Harapan Hidup | APK | : Angka Partisipasi Kasar |
| AMH | : Angka Melek Huruf | HLS | : Harapan Lama Sekolah |
| RLS | : Rata-rata Lama Sekolah | PNB | : Produk Nasional Bruto |
| PDB | : Produk Domestik Bruto | | |

Sumber : BPS

Tahun 2016 adalah tahun dimana BPS mengadaptasi perubahan metode penghitungan IPM 2015. UNDP sendiri sudah merubah metodologi sejak tahun 2010 dan direvisi tahun 2011 bahkan India dan Filipina telah memulai mengaplikasikan metode baru sejak tahun 2011. Adapun alasan dilakukan perubahan terhadap metodologi penghitungan IPM adalah:

1. Indikator Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak sensitif dalam menggambarkan kualitas pendidikan mengingat AMH hampir mendekati 100 di semua daerah yang berarti hampir semua penduduk bisa baca tulis sehingga tidak relefan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.
2. PDB Perkapita tidak dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

**Tabel 1.2 Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru Dimensi IPM Antara BPS dan UNDP**

| DIMENSI | METODE LAMA | | METODE BARU | |
|---|---|---|---|---|
| | UNDP | BPS | UNDP | BPS* |
| Kesehatan | Angka Harapan Hidup ($e_0$) | Angka Harapan Hidup ($e_0$) | Angka Harapan Hidup ($e_0$) | Angka Harapan Hidup ($e_0$) |
| Pengetahuan | 1. Angka Melek Huruf | 1. Angka Melek Huruf | 1. *Expected Years of Schooling* | 1. *Expected Years of Schooling* |
| | 2. Kombinasi APK | 2. *Mean Years of Schooling* | 2. *Mean Years of Schooling* | 2. *Mean Years of Schooling* |
| Standar Hidup Layak | PDB per kapita (PPP US$) | Pengeluaran per kapita Disesuaikan | PNB per kapita (PPP US$) | Pengeluaran per kapita Disesuaikan |
| Agregasi | Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pengetahuan} + I_{daya\ beli})$ | | Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{daya\ beli}}$ | |

Sumber : BPS

.Gambar 1.2 Perbandingan Metode Lama dan Metode Penghitungan IPM Antara BPS dan UNDP Menurut Dimensi IPM

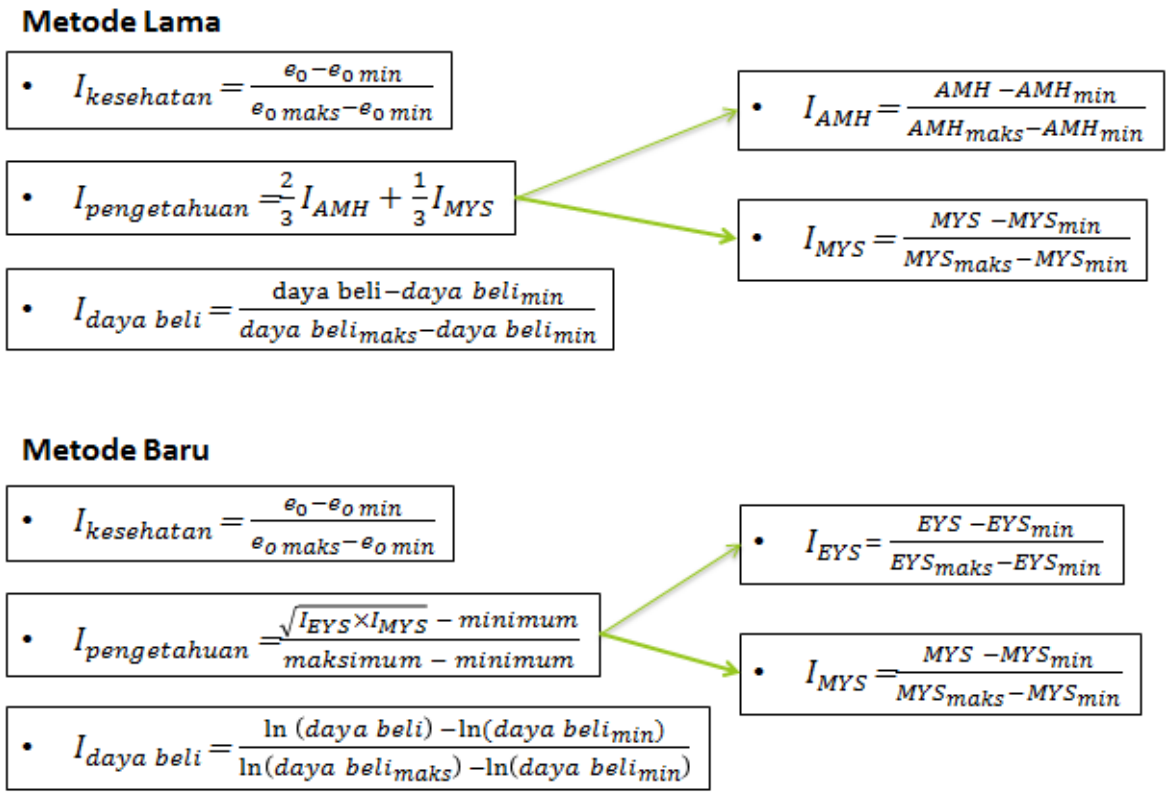


Sumber: BPS

# BAB II

# RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

## II. RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

### 2.1 Pencapaian Pembangunan Manusia

Pencapaian pembangunan manusia dapat dilihat dari percepatan pertumbuhan IPM. Dengan percepatan yang lebih tinggi bukan tidak mungkin suatu daerah akan mengejar ketertinggalannya dari daerah yang lebih tinggi dengan mempertahankan *speed* atau kecepatannya dan bila memungkinkan melakukan upaya untuk meningkatkan lagi. Berikut adalah formula untuk percepatan pertumbuhan IPM :

$$g = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Dimana:
*g* : Pertumbuhan IPM
$IPM_t$ : IPM tahun *t*
$IPM_{t-1}$ : IPM tahun *t-1*

IPM dihitung berdasarkan penggabungan ketiga indeks dimensi komponen IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pendapatan/daya beli. Indeks harapan hidup diperoleh dari umur harapan hidup, indeks pengetahuan diperoleh dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan indeks pendapatan diperoleh dari pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan

### 2.2 Tahapan Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia

**Dimensi Kesehatan**

Dimensi kesehatan dihitung dengan menggunakan indikator Umur harapan hidup (AHH). AHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Indikator ini mencerminkan kualitas kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Dimana nilai minimum digunakan adalah 20 tahun dan nilai maksimum sebesar 83,4 tahun.

Proses indeks kesehatan dirumuskan sebagai berikut :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Umur harapan hidup dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack. AHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan AHH negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi.

**Dimensi Pengetahuan**

Dimensi pengetahuan dihitung dengan menggunakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini menggambarkan kualitas pendidikan atau capaian pembangunan di bidang pendidikan di suatu wilayah.

HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berumur 7 tahun keatas sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai wajib belajar. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun ke atas. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Diasumsikan juga bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Adapun sumber data yang digunagan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan Susenas.

Proses penghitungan HLS dan RLS serta indeks pendidikan adalah sebagai berikut :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimana :

$HLS_{min}$ : 0 tahun
$HLS_{maks}$ : 18 tahun
$RLS_{min}$ : 0 tahun dan
$RLS_{maks}$ : 15 tahun
$I$ : Indeks

**Dimensi Standar Hidup Layak**

BPS menghitung IPM hingga level kabupaten, dimana tidak tersedia data PNB menurut kabupaten untuk menggunakan indikator seperti halnya UNDP. Oleh sebab itu digunakan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pengeluaran per kapita disesuaikan dihitung dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purcashing Power Parity – PPP*). Nilai ini dapat menggambarkan mengenai kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Penghitungan rata-rata pengeluaran per kapita dihitung dari data SUSENAS dan dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2011=100. Dengan demikian dapat menggambarkan perkembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat secara riil.

Komoditi yang digunakan bertambah dari 27 komoditi di metode penghitungan sebelumnya, ditambah menjadi 96 komoditi yang terdiri dari 66 komoditi makanan dan 30 komoditi non makanan.

**Tabel 2.1 Daftar Paket Komoditi yang Digunakan Dalam Penghitungan PPP**

| Kelompok Makanan | | KOMODITAS TERPILIH |
|---|---|---|
| Beras | Pepaya | Kelompok Nonmakanan |
| Tepung terigu | Minyak kelapa | |
| Ketela pohon/singkong | Minyak goreng lainnya | |
| Kentang | Kelapa | Rumah sendiri/bebas sewa |
| Tongkol/tuna/cakalang | Gula pasir | Rumah kontrak |
| Kembung | Teh | Rumah sewa |
| Bandeng | Kopi | Rumah dinas |
| Mujair | Garam | Listrik |
| Mas | Kecap | Air pam |
| Lele | Penyedap masakan/vetsin | LPG |
| Ikan segar lainnya | Mie instan | Minyak tanah |
| Daging sapi | Roti manis/roti lainnya | Lainnya (batu baterai, aki, korek, obat nyamuk dll) |
| Daging ayam ras | Kue kering | Perlengkapan mandi |
| Daging ayam kampung | Kue basah | Barang kecantikan |
| Telur ayam ras | Makanan gorengan | Perawatan kulit,muka,kuku,rambut |
| Susu kental manis | Gado-gado/ketoprak | Sabun cuci |
| Susu bubuk | Nasi campur/rames | Biaya rs pemerintah |
| Susu bubuk bayi | Nasi goreng | Biaya rs swasta |
| Bayam | Nasi putih | Puskesmas/pustu |
| Kangkung | Lontong/ketupat sayur | Praktek dokter/poliklinik |
| Kacang panjang | Soto/gule/sop/rawon/cincang | Spp |
| Bawang merah | Sate/tongseng | Bensin |
| Bawang putih | Mie bakso/mie rebus/mie goreng | Transportasi/pengangkutan umum |
| Cabe merah | Makanan ringan anak | Pos dan telekomunikasi |
| Cabe rawit | Ikang (goreng/bakar dll) | Pakaian jadi laki-laki dewasa |
| Tahu | Ayam/daging (goreng dll) | Pakaian jadi perempuan dewasa |
| Tempe | Makanan jadi lainnya | Pakaian jadi anak-anak |
| Jeruk | Air kemasan galon | Alas kaki |
| Mangga | Minuman jadi lainnya | Minyak pelumas |
| Salak | Es lainnya | Meubelair |
| Pisang ambon | Roko kretek filter | Peralatan rumah tangga |
| Pisang raja | Roko kretek tanpa filter | Perlengkapan perabot rumah tangga |
| Pisang lainnya | Rokok putih | Alat-alat dapur/makan |

Sumber : BPS

Proses penghitungan indeks pengeluaran per kapita yang disesuaikan dirumuskan sebagai berikut :

$$I_y = \frac{Ln(y) - Ln(y_{min})}{[Ln\,(y_{maks}) - Ln(y_{min})]}$$

Dimana:

$y$ : Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
$y_{min}$ : Nilai minimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan
$y_{maks}$ : Nilai maksimum komponen Pengeluaran per Kapita Setahun Disesuaikan

Daya beli minimum yang digunakan merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu kabupaten Tolikara Provinsi Papua sebesar Rp 1.007.436,00 . Sedangkan daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga tahun 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025 sebesar Rp 26.572.352,00 .

**Penghitungan IPM**

Dalam metode penghitungan yang baru digunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran yang disesuaikan. Proses dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Diharapkan dengan metode penghitungan agregasi secara geometrik ini, dapat memperbaiki kelemahan pada metode aritmatik sebelumnya.

# BAB III

# RUANG LINGKUP DAN METODE PENGHITUNGAN

# III. ANALISIS IPM KOTA PALANGKA RAYA

## 3.1 Struktur Ekonomi

Kota Palangka Raya merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas-aktivitas ekonomi mulai dari perdagangan, pendidikan, perbankan, industri pengolahan, transportasi, pemerintahan dan banyak aktivitas bisnis lainnya. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai lapangan usaha memiliki cabang yang tersebar di berbagai kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Tengah, berinduk atau memiliki kantor pusat di Palangka Raya. Hal inilah yang membuat Palangka Raya memiliki ciri sebagai Ibu Kota provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki kategori-kategori unggulan. Adapun lima kategori unggulan tahun 2017 adalah Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai kota pusat pemerintahan kategori ini memiliki *share* sebesar 21,04 persen, *share* Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,03 persen, Industri Pengolahan dengan *share* sebesar 11,12 persen, Kategori Konstruksi 10,92 persen dan Kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,55 persen.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah kategori yang paling banyak menyerap tenaga kerja pada tahun 2015 sebesar 34,57 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 36,51 persen. Pada tahun 2015 penyerapan tenaga kerja pada industri Jasa-jasa sebesar 29,83 persen meningkat menjadi 34,15 persen di tahun 2017, disusul industri konstruksi sebesar 9,16 persen. Perkembangan lapangan usaha/kategori yang banyak menyerap tenaga kerja menyebabkan arus migrasi masuk ke Kota Palangka Raya, yang secara tidak langsung mempengaruhi kategori-kategori lain untuk ikut berkembang. Kehadiran migran di Kota Palangka Raya ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap ekonomi di Kota Palangka Raya, mempengaruhi Kategori Akomodasi, Hotel dan Restoran; dan Jasa Keuangan, dan Jasa Perusahaan.

Dinamika penduduk pribumi dan pendatang menghadirkan komposisi dan sekaligus tantangan tersendiri dalam wacana pembangunan manusia di Palangka Raya,

dimana faktor manusia sebagai modal pembangunan diharapkan mampu menjadi subjek dan sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri. Bab ini akan membahas status pembangunan manusia Kota Palangka Raya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan fokus pada kondisi tahun 2017.

### 3.2 Status Pembangunan Manusia Palangka Raya

Status pembangunan manusia Kota Palangka Raya, secara umum dapat digambarkan dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Palangka Raya. Untuk melihat seberapa besar status pembangunan manusianya, perlu adanya keterbandingan pencapaian antar daerah, khususnya dalam satu provinsi yang sama. Adapun data capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita lihat pada lampiran 5.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah, IPM Kota Palangka Raya selalu menduduki peringkat pertama. Apabila dilihat dari angkanya, nilainya selalu berada di atas 78 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menggambarkan pembangunan manusia di Kota Palangka Raya selama periode 2013-2017 masuk dalam kategori “tinggi” dalam pencapaian pembangunan manusia. Peningkatan IPM setiap tahunnya mengindikasikan semakin baiknya kualitas hidup masyarakat Palangka Raya yang ditandai dengan peningkatan taraf hidup berupa meningkatnya kemampuan daya beli, umur harapan hidup yang semakin tinggi, serta tingkat pendidikan yang semakin membaik. Nilai IPM Kota Palangka Raya pada tahun 2017 sebesar 79,69 lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan IPM sebesar 69,79 dan IPM nasional sebesar 70,81.

**Gambar 3.1 Perkembangan IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017**

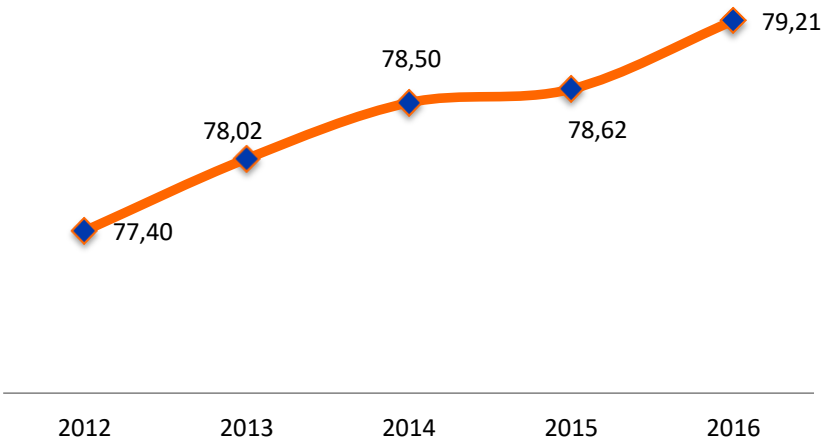


Sumber : BPS

## 3.3 Perkembangan Dimensi IPM Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

IPM adalah Indikator komposit yang memadukan dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak suatu daerah dalam satu angka tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang dipresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Upaya yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan seiring dengan peningkatan indikator-indikator sosial yang berkaitan dengan pembangunan. Tabel 3.1 menggambarkan perkembangan indikator IPM di Kota Palangka Raya selama periode lima tahun terakhir.

**Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017**

| Tahun | Umur harapan hidup AHH (Tahun) | Harapan Lama Sekolah HLS (Tahun) | Rata-rata Lama Sekolah RLS (Tahun) | Pengeluaraan riil per kapita disesuaikan PPd (ribu Rp) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **2013** | 72,85 | 14,58 | 10,69 | 12 397,24 |
| **2014** | 72,95 | 14,89 | 10,73 | 12 521,04 |
| **2015** | 72,97 | 14,90 | 10,74 | 12 629,00 |
| **2016** | 73,05 | 14,91 | 11,02 | 12 899,00 |
| **2017** | 73,13 | 14,92 | 11,03 | 13 435,00 |

Sumber : BPS

**Gambar 3.2 Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017**

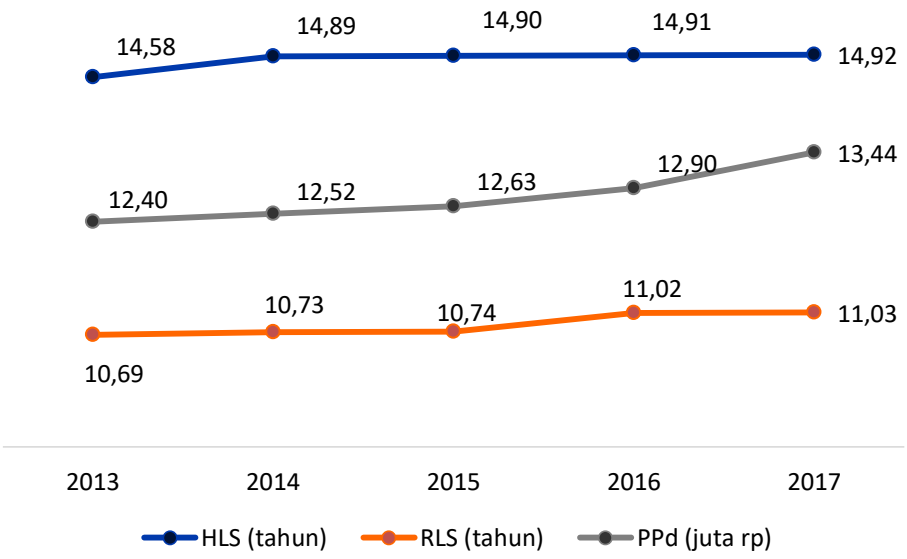


Sumber : BPS

**Dimensi Kesehatan**

Representasi dari dimensi kesehatan adalah umur harapan hidup. Umur harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan umur harapan hidup Kota Palangka Raya dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang lambat tetapi pasti. Dari umur harapan hidup sebesar 72,85 tahun pada tahun 2013, kini telah mencapai 73,13 tahun pada tahun 2017, yang berarti telah mencapai angka 73 tahun. Lambatnya kenaikan umur harapan hidup ini menggambarkan bahwa memang tidak mudah untuk menaikkan satu tahun dari indikator ini. Perlu upaya yang keras di bidang kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkannya, apalagi jika angka yang dicapainya sudah tinggi. Dari Gambar 3.3 dapat diketahui bahwa umur harapan hidup penduduk di Palangka Raya masih lebih tinggi dari rata-rata AHH penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah, dan masih lebih tinggi jika dibandingkan angka nasional dengan nilai Umur harapan hidup sebesar 71,06 tahun pada tahun 2017.

**Gambar 3.3 Umur harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangka Raya,**
**Tahun 2013-2017 (Tahun)**

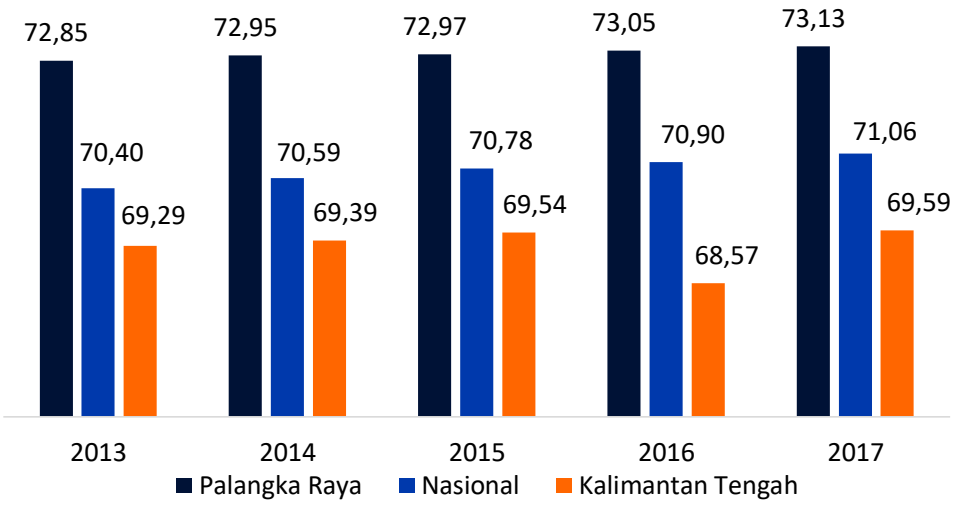


Sumber : BPS

Untuk melihat keterbandingan nilai umur harapan hidup dengan Kabupaten lainnya dalam satu provinsi Kalimantan Tengah dapat kita lihat pada gambar 3.4 berikut :

**Gambar 3.4. Umur harapan hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2017 (Tahun)**

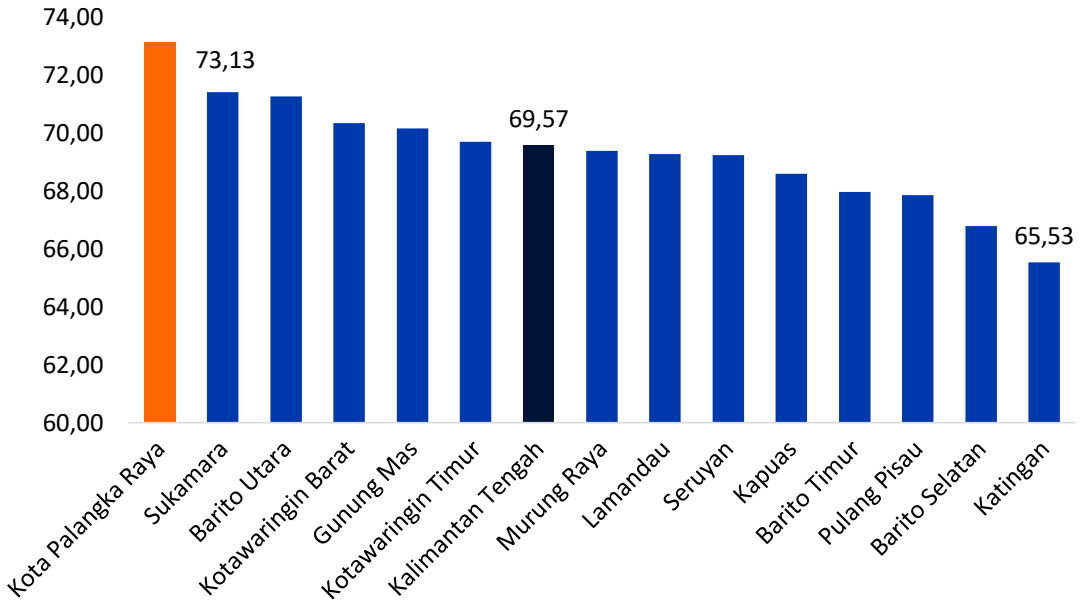


Sumber : BPS

Dapat dilihat bahwa Palangka Raya adalah kota yang memiliki AHH tertinggi disusul oleh Sukamara dan Barito Utara. Adapun Umur harapan hidup terendah berturut-turut Kabupaten Katingan, Barito Selatan dan Pulang Pisau.

**Dimensi Pengetahuan**

Sementara itu, dimensi pengetahuan diukur dengan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk usia 7 tahun ke atas yang ingin menempuh pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk usia 25 tahun ke atas menempuh pendidikannya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pada usia 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir atau seseorang sudah tidak menduduki bangku sekolah.

Adapun rata-rata lama sekolah lebih mengalami perkembangan yang relatif lebih cepat dibanding perkembangan umur harapan hidup, yaitu sebesar 10,69 tahun pada tahun 2013 dan sebesar 11,03 tahun pada tahun 2017. Hal ini berarti rata-rata

lama sekolah penduduk Palangka Raya sampai dengan kelas 2 SLTA. Walaupun pergeseran angka ini relatif cepat, namun sebenarnya upaya yang dilakukan cukup sulit. Sulitnya menggeser angka rata-rata lama sekolah ini disebabkan karena penduduk yang tidak bersekolah lagi cenderung akan tetap seperti itu dan akan terus diperhitungkan selama penduduk itu masih ada. Dengan demikian, perbaikan angka rata-rata lama sekolah lebih banyak dipengaruhi oleh generasi-generasi baru yang menimba ilmu di sekolah, di mana proporsinya mungkin lebih sedikit.

Pertumbuhan angka rata-rata lama sekolah di Kota Palangka Raya selama tahun 2013 sampai tahun 2017 cukup fluktuatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2016 dengan laju 2,61 persen sedangkan di tahun 2017 hanya sebesar 0,09 persen. Hal ini mengingat angka rata-rata lama sekolah sudah relatif tinggi sehingga pertumbuhannya menjadi semakin tipis. RLS Provinsi Kalimantan tengah tahun 2017 sebesar 8,29 tahun sementara RLS ada level nasional sebesar 8,10 Tahun atau setara tingkat 2 Sekolah Menengah Pertama.

**Gambar 3.5 Pertumbuhan Rata-rata lama sekolah di Kota Palangka Raya, Tahun 2013-2017 (Tahun)**

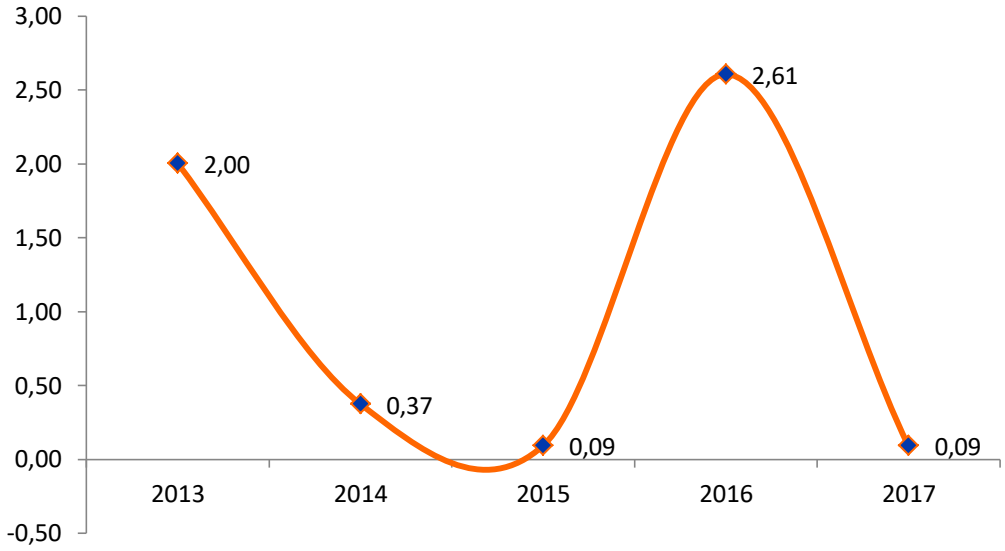


Sumber : BPS

**Gambar 3.6 RLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah,Tahun 2017 (Tahun)**

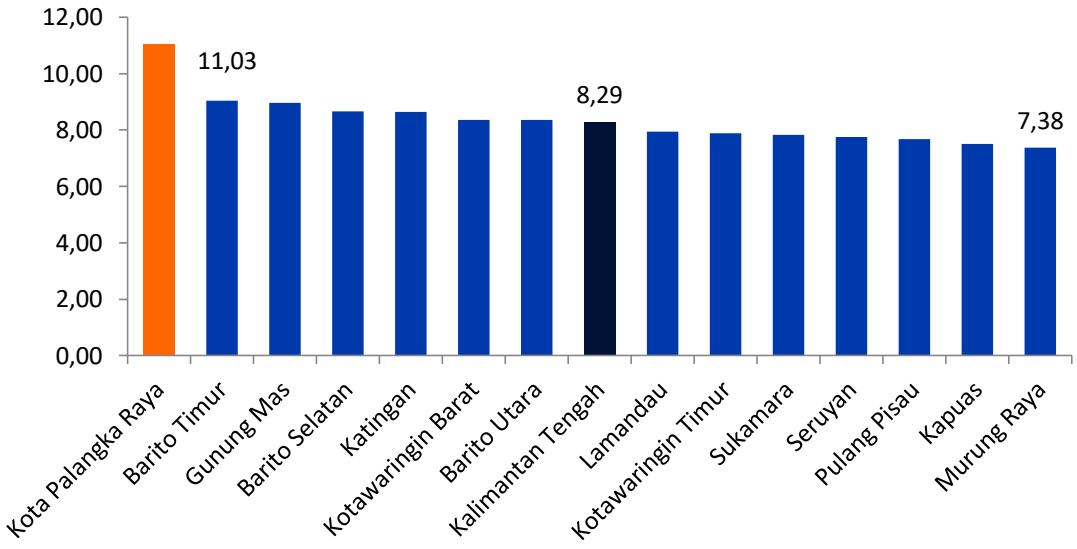


Sumber : BPS

Palangka Raya menduduki peringkat teratas rata-rata lama sekolah, tetapi tidak demikian halnya dengan percepatan pertumbuhan rata-rata lama sekolah tahun 2017 yang hanya mampu tumbuh sebesar 0,09 persen saja. Adapun peringkat selanjutnya berturut-turut Kotawaringin Timur dengan laju sebesar 3,73 persen, dan Seruyan dengan laju sebesar 3,47 persen. Adapun Kabupaten Kapuas adalah kabupaten dengan laju tertinggi RLS dengan laju sebesar 5,78 persen. Laju pertumbuhan rata-rata lama sekolah terendah. Selain Kota Palangka Raya, ada di Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Katingan dengan laju pertumbuhan rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 0,11 persen dan 0,12 persen.

Pada tahun 2013 di Kota Palangka Raya, angka harapan lama sekolah sebesar 14,58 tahun. Tahun 2017, angka harapan lama sekolah sebesar 14,92 tahun yang artinya, penduduk di Kota Palangka Raya berharap supaya dapat menempuh pendidikan formal setidaknya selama 14,92 tahun. Hal ini berarti rata-rata penduduk usia 7 tahun ke atas ingin agar dapat menempuh pendidikan setidaknya sampai jenjang universitas atau setidaknya program Diploma 3. Perkembangan angka harapan lama sekolah lebih lambat dari pada perkembangan angka rata-rata lama sekolah. Adapun salah satu faktor yang diduga paling berpengaruh terhadap perkembangan angka ini adalah faktor biaya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar pula biaya yang diperlukan. Hal ini yang menyebabkan angka harapan lama sekolah perkembangannnya tidak seoptimis angka rata-rata lama sekolah.

**Gambar 3.7 HLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Tahun)**

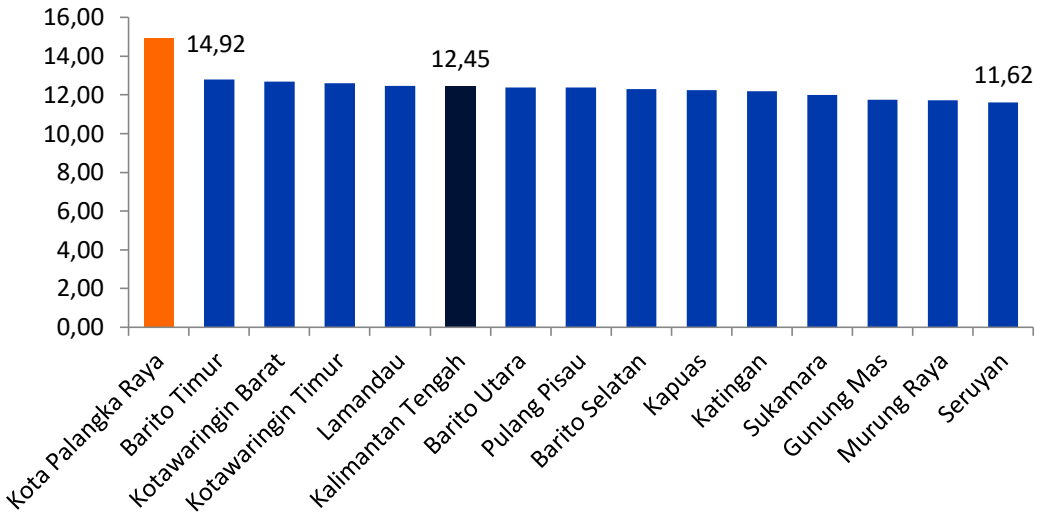


Sumber : BPS

**Gambar 3.8 Pertumbuhan Angka HLS Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Tahun)**

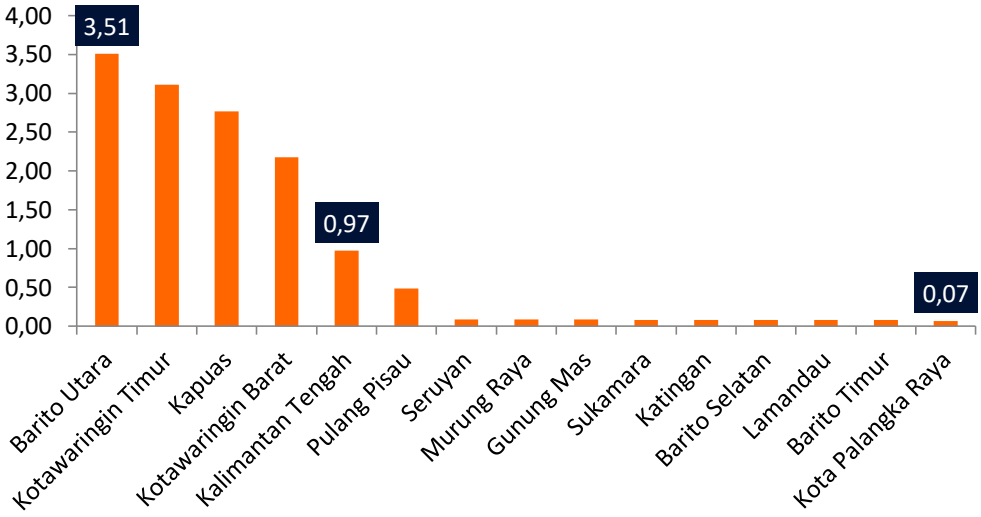


Sumber : BPS

Dari gambar 3.7 di atas dapat diketahui bahwa Kota Palangka Raya memiliki angka harapan lama sekolah tertinggi disusul Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat pada posisi ke tiga teratas. Dalam hal percepatan pertumbuhan

angka harapan lama sekolah nampak pada gambar 3.8. Kabupaten Barito Utara lebih optimis dalam merencanakan masa depan pendidikannya, dengan laju HLS sebesar 3,51 persen. Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki laju HLS yang relatif tinggi yaitu sebesar 3,11 persen. Sementara itu posisi ke tiga laju HLS tertinggi ada di Kabupaten Kapuas dengan laju sebesar 2,77 persen.

**Dimensi Hidup Layak**

Indikator komponen IPM lainnya, yaitu pengeluaran/konsumsi riil per kapita yang disesuaikan, atau disebut juga dengan paritas daya beli yang disesuaikan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian penduduk. Dalam konteks ini, satu rupiah di Palangka Raya akan memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Pada tahun 2017, konsumsi riil per kapita Kota Palangka Raya mencapai 13.345 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan sebesar 536 ribu rupiah. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi enam tahun yang lalu (2010), peningkatannya sebesar 1.038 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian penduduk semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya daya beli.

Dengan nilai per kapita sebesar 12.899 ribu rupiah, dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi standar hidup layak di Kota Palangka Raya dibutuhkan sebesar 1.038 ribu rupiah per bulan per kapita. Nilai ini relatif cukup tinggi mengingat Palangka Raya adalah Ibu Kota Kalimantan Tengah dengan tingkat harga dan kebutuhan yang sangat beragam. Hal ini menyebabkan beragam pula ketersediaan pilihan akan barang dan jasa konsumsi penduduk dan tingginya akan daya beli penduduk yang bersangkutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa gaya hidup penduduk kota besar membutuhkan biaya yang relatif lebih tinggi.

**Gambar 3.9 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017 (Persen)**

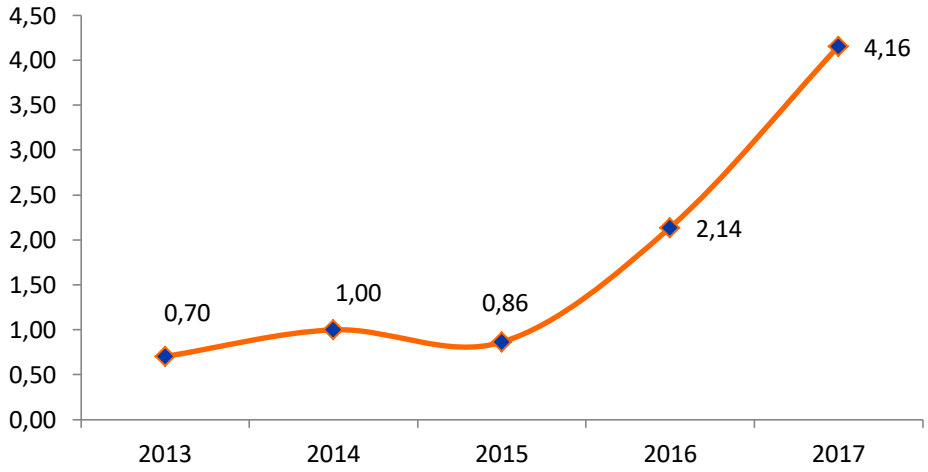


Sumber : BPS

Pertumbuhan pengeluaran perkapita di Kota Palangka Raya cukup fluktuatif. Tahun 2015 mengalami perlambatan yang menandakan bahwa angka pengeluaran perkapita sudah relatif cukup tinggi sehingga lajunya menjadi kian melambat, tahun 2016, pertumbuhannya kembali meningkat sebesar 2,14 persen dan tahun 2017 meningkat menjadi 4,16 persen.

Dimensi standar hidup layak digunakan untuk mengukur kemampuan akan pemenuhan kebutuhan hidup baik makanan ataupun non makanan secara riil. Riil ini dimaksudkan agar dapat melihat perkembangan peningkatan ataupun penurunan kuantitas ataupun kualitas konsumsi/pemenuhan kebutuhan hidup tersebut. Dengan demikian dapat dilihat perkembangan hasil pembangunan manusia.

***Gambar* 3.10 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Ribu Rp)**

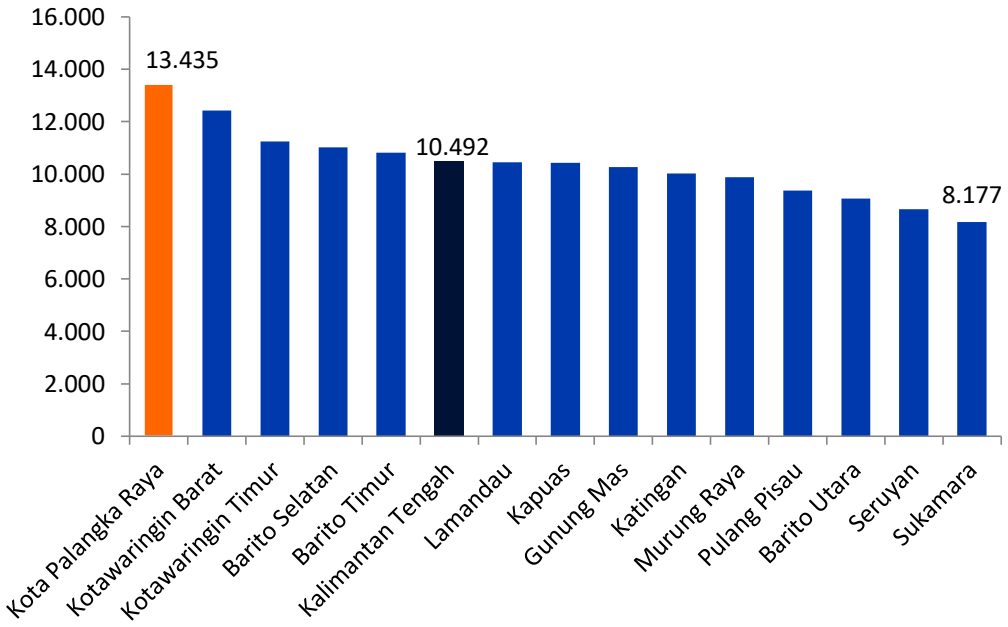


Sumber : BPS

Apabila dilihat dari besaran nilai pengeluaran konsumsi perkapita, maka Kota Palangka Raya menduduki peringkat pertama disusul Kabupaten Kotawaringin Barat dan kemudian Kabupaten Barito Selatan. Tiga Kabupaten dengan nilai terendah berturut-turut adalah Kabupaten Sukamara, Seruyan dan Barito Utara.

Kabupaten Sukamara sebagai Kabupaten dengan nilai pengeluaran riil perkapita terendah, yaitu sebesar 8.177 ribu rupiah, dapat dikatakan bahwa untuk memenuhi standar hidup layak di Kabupaten Sukamara dibutuhkan sebesar 681 ribu rupiah per bulan per kapita. Nilai ini naik sebesar 32 ribu rupiah bila dibandingkan tahun 2016. Hal ini salah satunya dapat menunjukan akan kurangnya ketersediaan pilihan barang dan jasa konsumsi penduduk dan juga rendahnya daya beli penduduk yang bersangkutan. Kabupaten lainnya yang rendah pengeluaran riil perkapitanya adalah Kabupaten Barito Utara, yang merupakan salah satu kabupaten induk.

**Gambar 3.11 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Persen)**

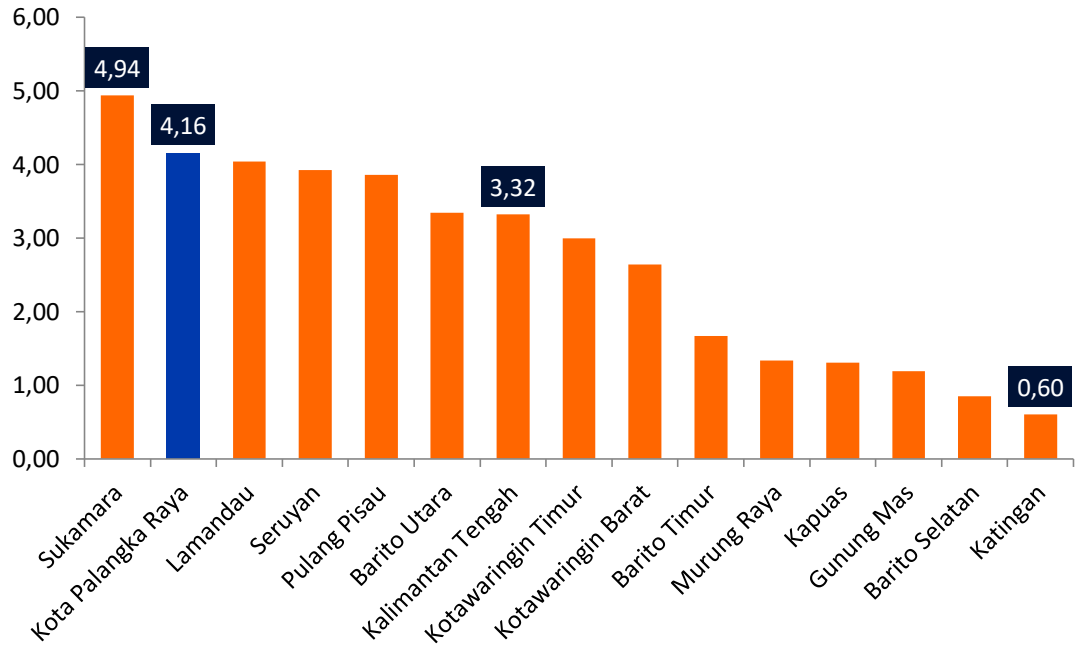


Sumber : BPS

Dilihat dari pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan dapat diketahui bahwa Kabupaten Sukamara memiliki pertumbuhan yang paling tinggi dalam mengejar ketertinggalannya pada dimensi standar hidup layak dengan laju 4,94 persen pada tahun 2017, disusul Kota Palangka Raya dengan laju 4,16 persen dan pada posisi ketiga diduduki Kabupaten Lamandau dengan laju sebesar 4,04 persen. Adapun Kabupaten Katingan memiliki laju pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Disesuaikan paling rendah, yakni sebesar 0,60 persen.

Setelah mengetahui komponen penentu besaran IPM, maka di bawah ini dapat kita lihat bagaimana keterbandingan Kota Palangka Raya dengan Kabupaten lainnya dalam mengejar ketertinggalannya dalam hal Pembangunan Manusia.

**Gambar 3.12 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, Tahun 2017 (Persen)**

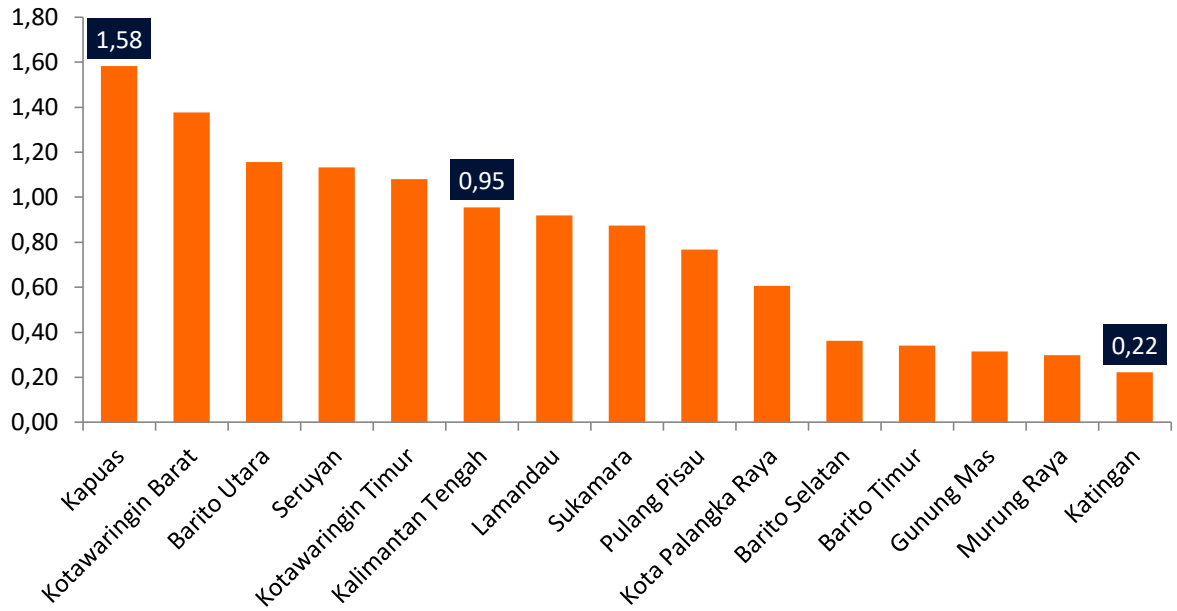


Sumber : BPS

Dari gambar 3.12 dapat kita ketahui bahwa tiga kabupaten yang unggul dalam meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia di tahun 2017 adalah Kabupaten Kapuas dengan laju sebesar 1,58 persen, disusul Kabupaten Kotawaringin Barat dengan laju 1,38 persen dan Kabupaten Barito Utara dengan laju sebesar 1,16 persen. Sementara itu, Kota Palangka Raya mengalami pembangunan manusia dengan laju sebesar 0,61 persen atau turun bila dibandingkan tahun sebelumnya dengan laju 0,75 persen.

# BAB IV

# KESIMPULAN

## IV. KESIMPULAN

Antara tahun 2013-2017, capaian pembangunan manusia Kota Palangka Raya cenderung mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 78,02 pada tahun 2013 menjadi 79,69 pada tahun 2017. Selama kurun waktu lima tahun IPM naik sebesar 1,67 poin. Percepatan pertumbuhan IPM tiap tahunnya cukup berfuktuasi. Sempat menunjukkan tren melambat pada periode 2014-2015 kemudian mulai meningkat pada tahun 2016. Hal ini mengindikasikan kecepatan Kota Palangka Raya untuk mencapai pembangunan manusia yang ideal mulai menunjukkan peningkatan. Perkembangan IPM selama kurun waktu lima tahun dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. IPM Kota Palangka Raya terus meningkat selama tahun 2013-2017, namun tidak mengubah status pembangunan manusia yaitu masuk dalam kategori tinggi. Dan dari sisi peringkat regional Kalimantan Tengah, juga tidak menunjukkan perubahan.
2. Indikator IPM meraih posisi tertinggi di Kalimantan Tengah untuk semua dimensi kesehatan, pengetahuan ataupun dimensi hidup layak Hidup.
3. Laju rata-rata pertumbuhan umur harapan hidup selama lima tahun terakhir sebesar 0,10 persen.
4. Laju rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah hidup selama lima tahun terakhir sebesar 0,84 persen dengan laju yang fluktuatif.
5. Laju rata-rata pertumbuhan rata-rata lama sekolah selama lima tahun terakhir sebesar 1,03 persen dengan laju yang fluktuatif.
6. Laju pertumbuhan IPM, Kota Palangka Raya menduduki urutan ke 9 dari 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, naik 3 peringkat. Nilai IPM Kota Palangka Raya menduduki peringkat pertama di Provinsi Kalimantan Tengah.

# LAMPIRAN

LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1. Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)**

| Prov/Kab/Kota | UHH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| KALIMANTAN TENGAH | 69,29 | 69,39 | 69,54 | 69,57 | 69,59 |
| Kotawaringin Barat | 69,68 | 69,77 | 70,07 | 70,21 | 70,34 |
| Kotawaringin Timur | 69,32 | 69,41 | 69,51 | 69,60 | 69,70 |
| Kapuas | 68,21 | 68,30 | 68,40 | 68,49 | 68,59 |
| Barito Selatan | 65,99 | 66,08 | 66,48 | 66,63 | 66,78 |
| Barito Utara | 70,81 | 70,91 | 71,01 | 71,26 | 71,27 |
| Sukamara | 71,10 | 71,19 | 71,24 | 71,32 | 71,41 |
| Lamandau | 68,98 | 69,07 | 69,12 | 69,20 | 69,28 |
| Seruyan | 68,49 | 68,58 | 68,88 | 69,22 | 69,23 |
| Katingan | 64,89 | 64,98 | 65,28 | 65,40 | 65,53 |
| Pulang Pisau | 67,35 | 67,44 | 67,64 | 67,75 | 67,86 |
| Gunung Mas | 69,50 | 69,59 | 69,89 | 70,02 | 70,15 |
| Barito Timur | 67,32 | 67,41 | 67,71 | 67,84 | 67,97 |
| Murung Raya | 69,02 | 69,11 | 69,21 | 69,30 | 69,39 |
| Kota Palangka Raya | 72,85 | 72,95 | 72,97 | 73,05 | 73,13 |

**LAMPIRAN 2. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)**

| Prov/Kab/Kota | HLS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| KALIMANTAN TENGAH | 11,71 | 11,93 | 12,22 | 12,33 | 12,45 |
| Kotawaringin Barat | 11,90 | 12,12 | 12,13 | 12,42 | 12,69 |
| Kotawaringin Timur | 11,82 | 12,04 | 12,05 | 12,21 | 12,59 |
| Kapuas | 10,95 | 11,14 | 11,64 | 11,92 | 12,25 |
| Barito Selatan | 11,01 | 11,14 | 11,99 | 12,30 | 12,31 |
| Barito Utara | 11,01 | 11,15 | 11,50 | 11,96 | 12,38 |
| Sukamara | 10,79 | 11,09 | 11,55 | 11,97 | 11,98 |
| Lamandau | 11,75 | 11,80 | 12,43 | 12,44 | 12,45 |
| Seruyan | 10,70 | 11,08 | 11,56 | 11,61 | 11,62 |
| Katingan | 11,40 | 11,69 | 12,03 | 12,19 | 12,20 |
| Pulang Pisau | 11,48 | 11,63 | 12,16 | 12,32 | 12,38 |
| Gunung Mas | 10,65 | 10,82 | 11,44 | 11,74 | 11,75 |
| Barito Timur | 11,77 | 11,98 | 12,31 | 12,79 | 12,80 |
| Murung Raya | 11,33 | 11,68 | 11,69 | 11,71 | 11,72 |
| Kota Palangka Raya | 14,58 | 14,89 | 14,90 | 14,91 | 14,92 |

**LAMPIRAN 3. Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)**

| Prov/Kab/Kota | RLS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| KALIMANTAN TENGAH | 7,79 | 7,82 | 8,03 | 8,13 | 8,29 |
| Kotawaringin Barat | 7,58 | 7,82 | 8,01 | 8,05 | 8,35 |
| Kotawaringin Timur | 7,59 | 7,69 | 7,70 | 7,88 | 7,89 |
| Kapuas | 6,84 | 6,94 | 6,94 | 7,09 | 7,50 |
| Barito Selatan | 8,16 | 8,27 | 8,59 | 8,60 | 8,67 |
| Barito Utara | 7,97 | 8,00 | 8,33 | 8,34 | 8,35 |
| Sukamara | 7,21 | 7,30 | 7,81 | 7,82 | 7,83 |
| Lamandau | 7,55 | 7,67 | 7,68 | 7,79 | 7,94 |
| Seruyan | 6,90 | 7,03 | 7,45 | 7,49 | 7,75 |
| Katingan | 8,17 | 8,23 | 8,62 | 8,63 | 8,64 |
| Pulang Pisau | 7,55 | 7,58 | 7,59 | 7,66 | 7,67 |
| Gunung Mas | 8,73 | 8,74 | 8,93 | 8,94 | 8,96 |
| Barito Timur | 8,98 | 9,01 | 9,02 | 9,03 | 9,04 |
| Murung Raya | 7,15 | 7,18 | 7,36 | 7,37 | 7,38 |
| Kota Palangka Raya | 10,69 | 10,73 | 10,74 | 11,02 | 11,03 |

**LAMPIRAN 4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (ribu Rupiah)**

| Prov/Kab/Kota | PENGELUARAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| KALIMANTAN TENGAH | 9 641 | 9 682 | 9 809 | 10 155 | 10 492 |
| Kotawaringin Barat | 11 857 | 11 908 | 11 979 | 12 101 | 12 420 |
| Kotawaringin Timur | 10 343 | 10 430 | 10 525 | 10 922 | 11 249 |
| Kapuas | 9 633 | 9 726 | 9 894 | 10 287 | 10 421 |
| Barito Selatan | 10 283 | 10 374 | 10 570 | 10 938 | 11 031 |
| Barito Utara | 7 614 | 8 326 | 8 534 | 8 774 | 9 067 |
| Sukamara | 7 545 | 7 568 | 7 709 | 7 792 | 8 177 |
| Lamandau | 9 881 | 9 925 | 9 999 | 10 049 | 10 455 |
| Seruyan | 7 919 | 7 958 | 8 026 | 8 331 | 8 658 |
| Katingan | 9 452 | 9 542 | 9 599 | 9 969 | 10 029 |
| Pulang Pisau | 8 537 | 8 556 | 8 639 | 9 017 | 9 365 |
| Gunung Mas | 9 823 | 9 965 | 10 044 | 10 155 | 10 276 |
| Barito Timur | 10 450 | 10 465 | 10 570 | 10 631 | 10 808 |
| Murung Raya | 9 245 | 9 268 | 9 328 | 9 742 | 9 872 |
| Kota Palangka Raya | 12 397 | 12 521 | 12 629 | 12 899 | 13 435 |

**LAMPIRAN 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 (Tahun)**

| Prov/Kab/Kota | IPM | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| KALIMANTAN TENGAH | 67,41 | 67,77 | 68,53 | 69,13 | 69,79 |
| Kotawaringin Barat | 69,51 | 70,14 | 70,60 | 71,13 | 72,11 |
| Kotawaringin Timur | 67,95 | 68,45 | 68,61 | 69,42 | 70,17 |
| Kapuas | 64,82 | 65,29 | 66,07 | 66,98 | 68,04 |
| Barito Selatan | 66,20 | 66,61 | 68,27 | 69,00 | 69,25 |
| Barito Utara | 65,12 | 66,30 | 67,38 | 68,28 | 69,07 |
| Sukamara | 63,92 | 64,44 | 65,80 | 66,40 | 66,98 |
| Lamandau | 67,23 | 67,53 | 68,30 | 68,54 | 69,17 |
| Seruyan | 62,81 | 63,49 | 64,77 | 65,40 | 66,14 |
| Katingan | 65,29 | 65,79 | 66,81 | 67,41 | 67,56 |
| Pulang Pisau | 64,76 | 65,00 | 65,76 | 66,49 | 67,00 |
| Gunung Mas | 67,75 | 68,13 | 69,24 | 69,73 | 69,95 |
| Barito Timur | 68,82 | 69,12 | 69,71 | 70,33 | 70,57 |
| Murung Raya | 65,62 | 66,10 | 66,46 | 66,96 | 67,16 |
| Kota Palangka Raya | 78,02 | 78,50 | 78,62 | 79,21 | 79,69 |

**LAMPIRAN 6. Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Miliar Rp)**

| Kategori/Lapangan Usaha | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 251,3 | 283,2 | 320,3 | 346,2 | 372,2 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 100,4 | 120,6 | 139,7 | 164,5 | 192,8 |
| C | Industri Pengolahan | 951,4 | 1 156,2 | 1 253,9 | 1 412,5 | 1 614,5 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 15,2 | 19,3 | 34,2 | 39,6 | 46,7 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 14,0 | 19,8 | 20,1 | 22,8 | 25,0 |
| F | Konstruksi | 866,2 | 1 029,9 | 1 222,2 | 1 455,2 | 1 585,1 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1 506,1 | 1 713,4 | 1 895,3 | 2197,0 | 2617,5 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 683,1 | 798,7 | 939,6 | 1 080,4 | 1 240,9 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 411,9 | 445,2 | 521,5 | 626,0 | 729,5 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 144,0 | 163,3 | 172,2 | 188,0 | 208,0 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 655,9 | 755,8 | 798,8 | 905,7 | 1 049,5 |
| L | Real Estate | 253,8 | 280,6 | 339,2 | 391,3 | 436,8 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 5,9 | 6,5 | 7,6 | 8,7 | 10,1 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 2 029,8 | 2 187,9 | 2 630,4 | 2 788,9 | 3 053,7 |
| P | Jasa Pendidikan | 464,7 | 523,0 | 606,9 | 708,9 | 806,7 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 182,8 | 214,0 | 255,2 | 302,5 | 349,3 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 101,5 | 112,3 | 132,5 | 155,0 | 175,7 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | | **8 637,9** | **9 829,6** | **11 289,3** | **11 289,3** | **14 514,0** |

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

**LAMPIRAN 7. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2013-2017 (Persen)**

| Kategori/Lapangan Usaha | | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016* | 2017** |
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 2,91 | 2,88 | 2,84 | 2,71 | 2,56 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 1,16 | 1,23 | 1,24 | 1,29 | 1,33 |
| C | Industri Pengolahan | 11,01 | 11,76 | 11,11 | 11,04 | 11,12 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,31 | 0,32 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,17 |
| F | Konstruksi | 10,03 | 10,48 | 10,83 | 11,38 | 10,92 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 17,44 | 17,43 | 16,79 | 17,17 | 18,03 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 7,91 | 8,13 | 8,32 | 8,45 | 8,55 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 4,77 | 4,53 | 4,62 | 4,89 | 5,03 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,67 | 1,66 | 1,52 | 1,47 | 1,43 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 7,59 | 7,69 | 7,08 | 7,08 | 7,23 |
| L | Real Estate | 2,94 | 2,85 | 3,00 | 3,06 | 3,01 |
| M,N | Jasa Perusahaan | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 23,50 | 22,26 | 23,30 | 21,80 | 21,04 |
| P | Jasa Pendidikan | 5,38 | 5,32 | 5,38 | 5,54 | 5,56 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 2,12 | 2,18 | 2,26 | 2,36 | 2,41 |
| R,S,T,U | Jasa lainnya | 1,17 | 1,14 | 1,17 | 1,21 | 1,21 |
| **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |

** Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*